

SMART CITY KABUPATEN PURWOREJO : KERANGKA KONSEPTUAL *THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) E-GOVERNMENT*

Rizky Fadhillah

NPP. 30.0718

*Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: 30.0718@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Asmungi, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *E-Government in Indonesia or the Electronic-Based Government System (SPBE) is one aspect that is considered from the central level to the regional level, one example is the evaluation of the implementation of the electronic-based government system carried out by the Ministry of Agriculture. Purworejo Regency is one of the Regional Governments that implements e-government and participates in the evaluation with SPBE index data for 2021 and 2022, namely 2.34 and 2.80. Purpose:* The purpose of this study is to obtain a conceptual framework of e-government based on the government's perspective with a case study in the Communication, Informatics, Statistics and Coding Office of Purworejo district. **Method:** The research was conducted using qualitative methods with the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT). Data collection techniques are carried out through interviews, documentation and observation which are then analyzed using data triangulation. **Result :** Implementation and development to achieve community expectations requires encouragement from the government so that the implementation of e-government can affect the community and government. Based on the business expectations, the implementation and development of e-government requires consideration of human resources and ICT literacy so that accessibility can be achieved and optimal utilization and use internally and externally government. Meanwhile, based on the expectation of e-government performance can produce efficiency in time, cost and energy of government administration. **Conclusion:** Based on the research conducted, results were obtained on the social influence of the community from the government's point of view on the implementation of e-government, performance expectations and efforts of the Purworejo Regency Government in adopting e-government and the conceptual framework of e-government.

Keywords: *e-government, Conceptual Framework, Purworejo, UTAUT.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *E-Government di Indonesia atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah salah satu contohnya dengan adanya evaluasi pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang dilakukan oleh Kemenpanrb. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang menerapkan e-government dan mengikuti evaluasi dengan data indeks SPBE 2021 dan 2022 yaitu 2,34 dan 2,80. Tujuan:* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mendapatkan suatu kerangka konseptual e-government berdasarkan perspektif pemerintah dengan studi kasus di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian kabupaten Purworejo. **Metode:** Penelitian yang

dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teori *unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang kemudian dianalisis menggunakan triangulasi data. **Hasil/Temuan:** Penerapan dan pengembangan untuk mencapai harapan masyarakat diperlukan dorongan dari pemerintah sehingga penerapan *e-government* dapat berpengaruh di masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan segi harapan usaha didapatkan penerapan dan pengembangan *e-government* membutuhkan pertimbangan SDM serta literasi TIK sehingga aksesibilitas dapat tercapai dan optimal pemanfaatan dan penggunaan secara internal maupun eksternal pemerintah. Sedangkan berdasarkan harapan kinerja *e-government* dapat menghasilkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga penyelenggaraan pemerintahan. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil tentang pengaruh sosial masyarakat dari sudut pandang pemerintah terhadap penerapan *e-government*, harapan kinerja dan usaha Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengadopsi *e-government* serta kerangka konseptual *e-government*. **Kata kunci:** *e-government*, Kerangka Konseptual, Purworejo, UTAUT.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Smart city berkembang dengan memunculkan berbagai dimensi salah satunya lahir dimensi smart governance atau yang dikenal dengan *e-government* (Gao et al., 2020). *Smart city* dan *e-government* berjalan beriringan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. *E-government* diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Dzikrullah & Angga, 2017). *E-government* merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengkolaborasikan teknologi komunikasi dan informasi serta bertransformasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di sektor pribadi ataupun di sektor umum, dengan harapan dapat memperbaiki efisiensi dan pelayanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Al-Nidawi et al., 2018).

Pemerintah Indonesia secara resmi mendukung penerapan dan pengembangan *e-government*. Perkembangannya *e-government* di Indonesia secara yuridis dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 yang mengatur tentang kebijakan serta strategi Indonesia dalam pengembangan *e-government*. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE).

E-government di Indonesia merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah salah satu contohnya dengan adanya Peningkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang dilakukan setiap tahunnya dan menjadi acuan tolak ukur perkembangan *e-government* yang ada di sektor pemerintahan. Hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada tahun 2021 didasarkan kepada Keputusan MENPAN-RB Nomor 1503 tahun 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik terdapat 4 domain penilaian, 8 aspek dan 47 indikator. Masing-masing indikator memiliki lima level yang menyatakan seberapa jauh proses perkembangan dan pencapaiannya.

Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 meraih penghargaan *smart city* nasional dari Menteri Kominfo di Jakarta pada bulan Desember. Penghargaan tersebut didapatkan setelah Kabupaten Purworejo berhasil masuk kedalam program 100 *smart city* nasional dan satu dari 48 kabupaten/kota (Imam, 2021). Sedangkan dalam sisi *e-government* di kabupaten Purworejo sudah berjalan dengan landasan hukum Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kepengintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan pemerintah kabupaten Purworejo.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di Kabupaten Purworejo, berikut merupakan data indeks SPBE Kabupaten Purworejo dari tahun 2017-2022.

Tabel 1 :

Indeks SPBE Kabupaten Purworejo tahun 2017-2022

Tahun	Indeks
1	2
2017	1,86
2018	2,04
2019	2,96
2020	Tidak ada evaluasi dikarenakan pandemi
2021	2,34
2022	2,80

Sumber : Dokumen Diskominfoasandi Kabupaten Purworejo

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2017-2021 didapatkan bahwa perkembangan SPBE di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga ke tahun 2019. Di tahun 2020 tidak dilakukan evaluasi dikarenakan terjadi pandemi. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan indeks SPBE dibandingkan dengan hasil indeks SPBE di tahun 2019.

Kerangka Konseptual merupakan sebuah hasil akhir atas bagaimana pendapat internal Pemerintah terutama Diskominfoasandi Kabupaten Purworejo dalam memandang *e-government*. Diskominfoasandi sebagai *leading sector* yaitu pemain kunci *e-government* di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kerangka konseptual *e-government* berdasarkan internal Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Diskominfoasandi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Indeks SPBE tahun 2021 yang di publikasikan oleh Kemenpanrb melalui Keputusan Menteri PAN&RB Nomor 1503 tahun 2021 bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Indeks 2,74 dengan predikat “baik” sedangkan Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 berdasarkan Indeks evaluasi SPBE oleh Kemenpanrb mendapatkan nilai 2,34 atau berada di predikat “cukup”.

Indeks SPBE tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PAN&RB Nomor 108 tahun 2023 bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Indeks SPBE 3,34 dengan predikat baik atau meningkat 0,60 dibandingkan pada tahun 2021. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 mendapatkan Indeks SPBE 2,80 atau meningkat 0,46 dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo masih tertinggal dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penerapan SPBE.

Penerapan SPBE di sekitar Purworejo pada tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Indeks SPBE seperti Kabupaten Wonosobo 2,90; Kabupaten Magelang 3,13; Pemerintah Kabupaten Kebumen 3,44; dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 3,02. Hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo masih tertinggal dibandingkan dengan Pemerintah sekitar terkait dengan penerapan *e-government*.. Pemerintah Kabupaten Purworejo akan terus tertinggal jika membiarkan kondisi tersebut tanpa melakukan akselerasi terutama di bidang penerapan *e-government*.

Pemantauan dan evaluasi SPBE di tahun 2021 mendapatkan indeks 2,34 dan tahun 2022 mendapatkan indeks 2,80 dengan rincian indeks bernilai 1 di tahun 2021 sejumlah 15 dan 2022 sejumlah 11. Indeks bernilai 2 sejumlah 11 dan 2022 sejumlah 10. Hal tersebut membuktikan bahwa tahun 2021 dari 47 indeks 26 diantara bernilai 1 dan 2 sedangkan tahun 2022 sejumlah 21 indeks. Hal tersebut membuktikan bahwa lebih dari 50% indeks masih dibawah 2 terutama di domain manajemen SPBE, domain kebijakan SPBE dan sub-domain perencanaan strategis SPBE.

Kabupaten Purworejo sudah lama dalam penerapan penggunaan TIK dalam sektor Pemerintahan. Namun, masih terdapat ketidakseragaman dalam penerapan teknologi di Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta diak adanya standar panduan serta kebijakan terkait penerapan *e-government* sehingga prosesnya dinilai tidak berjalan dengan efektif sedangkan kondisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang efektif, cepat dan transparan serta diharapkan dapat menyederhanakan, mempercepat, dan menghemat waktu layanan birokrasi serta trasnparansi waktu, biaya dan prosesnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Alvedi Sabani, Hepung Deng dan Vinh Thai pada tahun 2018 dengan judul “*A Conceptual Framework for the adoption of E-government in Indonesia*”. Merupakan *Conference Paper* yang di publikasikan oleh *Australasian Conference on Information Systems* di Sydney, Australia. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang faktor pentung untuk mengaplikasikan kepada warga negara serta memberikan saran yang berhubungan kepada Pemerintah Indonesia tentang penerapan adopsi *e-government* (Sabani et al., 2018). Penelitian selanjutnya yang dilakukan Nur Inna Alfiah dengan judul “Pengaruh Penerapan *e-government* pada Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sumenep” dipublikasikan oleh Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik tahun 2019. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-government* dalam upaya Pengembangan *smart city* di Kabupaten Sumenep (Alfiah, 2019). Kemudian penelitian dengan judul “*Analysis of citizens Acceptance for e-government Services in Bandung, Indonesia: The Use of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model*” yang dilakukan oleh Kahfi Ahadian Mutaqin dan Edi Sutoyo dengan tujuan untuk menilai tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi *e-punten* dengan menggunakan metode UTAUT (Mutaqin & Sutoyo, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Safia Maznorbalia dan Muhammad Aiman Awalludin bertujuan untuk mempelajari tentang faktor kunci warga di Malaysia tertuama di Sintek dalam penerimaan dan penggunaan layanan *e-government* dengan menggunakan model UTAUT (Safiah Maznorbalia & Aiman Awalluddin, 2021). Penelitian terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mosleh Zebaree, Musbah Aqel dan Mary Agoyi dengan judul “Sustainable adoption of *e-government* form the UTAUT Perspective”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta mempelajari keberlanjutan dari adopsi penerapan *e-government* di Irak Utara. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode Kuantitaitf dengan data primer melalui kuisoner (Zeebaree et al., 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki keterbaruan dimana melakukan penelitian dengan tujuan berupa menggambarkan kerangka konseptual *e-government* model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) berdasarkan perspektif pemerintah. Penelitian tersebut masih jarang dilakukan oleh peneliti lainnya dikarenakan lebih banyak membahas terkait dengan evaluasi atau analisa penerapan *e-government*. Model UTAUT digunakan karena sudah banyak digunakan di luar Indonesia dalam menciptakan permodelan *e-government* di suatu pemerintah sedangkan untuk di Indonesia masih sedikit penelitian yang menggunakan model tersebut. Pada Dasarnya UTAUT merupakan metode kuantitatif sedangkan terdapat penelitian yang dipublikasikan oleh Sabani (2018) menurunkan UTAUT tersebut menjadi metode kualitatif. Penelitian menggunakan UTAUT dengan metode kualitatif hingga saat ini masih sedikit dilakukan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerangka konseptual *e-government* Kabupaten Purworejo berdasarkan teori *The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) berdasarkan perspektif Pemerintah (Studi kasus di Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo).

II. METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk melakukan peneliti lebih mendalam dan spesifik terhadap suatu hal serta dapat mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian menggunakan teori *e-government* model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dipublikasikan oleh Sabani (2018) sebagai bentuk turunan dari Model UTAUT yang pertama kali di publikasikan oleh *Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis dan Fred D. Davis* pada tahun 2003. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier (LA. Hatani, 2008). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Abdusamad, 2021). Data didapatkan dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi (Hardani & Andriani, 2020). Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis *Miles and Huberman* dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian terkait dengan *e-government* di Kabupaten Purworejo menggunakan teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) untuk mendapatkan kerangka konseptual yang tersusun dari tiga dimensi yaitu pengaruh sosial, harapan usaha dan harapan kinerja.

3.1. Kerangka Konseptual *E-Government* Kabupaten Purworejo

E-Government berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 dijelaskan sebagai suatu upaya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kerangka konseptual *e-government* dengan teori UTAUT berdasarkan perspektif pemerintah khususnya Dinas Komunikasi, informatika, statistika dan persandian Kabupaten Purworejo.

3.1.1. *Social Influence* (Pengaruh Sosial)

Pengaruh sosial diartikan sebagai sejauh mana seseorang merasakan pentingnya adopsi *e-government*. Pengaruh sosial mendefinisikan tentang bagaimana seseorang baik itu pemerintah ataupun masyarakat dapat menerima perubahan teknologi dan mengadopsinya. Pengaruh sosial memiliki dua variabel yaitu dorongan pemerintah atau *government encouragement* dan harapan masyarakat atau *community expectation*.

Dorongan pemerintah sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan dan Pengembangan *e-government*. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terkait dengan dorongan pemerintah di Kabupaten Purworejo yaitu dengan adanya kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait dengan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut sebagai bentuk dorongan pemerintah untuk mengetahui dan memperbaiki sektor-sektor yang mengalami kekurangan dan harus dilakukan perencanaan guna memperbaiki sektor-sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan dukungan dalam penerapan dan

Pengembangan *e-government* dalam bentuk legalistik dengan adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2017. Legalistik tersebut mengatur terkait dengan hal umum sumber daya aparatur, infrastruktur, anggaran, dan inovasi peningkatan dan penerapan *e-government*.

Harapan masyarakat sebagai suatu kondisi kedekatan individu dalam mengambil tindakan dan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan *e-government*. Masyarakat di Kabupaten Purworejo memiliki harapan dimana bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pelayanan serta dapat lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pengawasan dan pelaporan terkait jalannya pemerintahan.

Pengaruh sosial terkait dengan penerapan dan pengembangan *e-government* di Kabupaten Purworejo yaitu dorongan Pemkab Purworejo dalam penerapan dan pengembangan *e-government* berupa pembaruan regulasi, peningkatan anggaran, sumber daya aparatur, infrastruktur dan inovasi-inovasi peningkatan dan penerapan *e-government* pada perangkat daerah; masyarakat diekspetaskan bisa mendapatkan pelayanan publik yang diinginkan kapan saja dan dimana saja dengan mudah dan cepat tanpa birokrasi berbelit-belit dan transparan; dan masyarakat ikut serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan.

3.1.2. *Effort Expectancy* (Harapan Usaha)

Harapan usaha atau *Effort Expectancy* merupakan kemudahan usaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam pemerintah, kemudahan mempengaruhi penerapan dan Pengembangan *e-government*. Harapan usaha sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana manfaat penggunaan dan penerapan *e-government*. Harapan usaha memiliki tiga variabel yaitu aksesibilitas, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta kegunaan.

Aksesibilitas didefinisikan sebagai kualitas tentang kemudahan dalam menjangkau *e-government*. Berdasarkan pengamatan di Kabupaten Purworejo telah ada berbagai macam situs pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan masing-masing yang merupakan sebagai bentuk aksesibilitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Teknologi Informatika, Statistik, dan Persandian serta Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas Diskominfoasandi Kabupaten Purworejo diketahui bahwa aksesibilitas *e-government* sudah baik secara internal ataupun eksternal pemerintah. Terdapat tantangan yang ditemukan yaitu banyaknya jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Purworejo sedangkan jumlah SDM bidang teknis sangatlah terbatas.

Kemudian variabel literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai kemampuan individu untuk menggunakan sarana dan prasarana TIK. Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui sebagian besar aparatur di Diskominfoasandi telah melek digital meskipun masih terdapat beberapa aparatur yang didominasi lanjut usia terbatas dalam literasi TIK. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan informan mendapatkan hasil bahwa terdapat sebagian aparatur masih terhambat dalam literasi TIK yang didominasi oleh lanjut usia namun dapat diminimalkan dengan membantu secara personal selain itu dilakukan upaya peningkatan literasi TIK dengan pengadaan sosialisasi dan pelatihan digital kepada admin tingkat desa/kelurahan/kecamatan serta melakukan jembut bola dengan mendatangi ke masing-masing kantor kecamatan.

Variabel ketiga yaitu kegunaan. Kegunaan didefinisikan sebagai tingkat upaya yang diperlukan untuk mempelajari dan menggunakan *e-government*. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Purworejo secara internal ataupun eksternal telah dilakukan digitalisasi. Bidang internal dimana terdapat penyimpanan berkas digital milik *Purworejokab.go.id* selain itu telah terjadi pergeseran kegiatan rapat dari tatap muka menjadi daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Pemda Kabupaten Purworejo menggunakan digitalisasi

untuk menciptakan pemerintah digital baik secara internal ataupun eksternal sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah.

Harapan usaha dalam penerapan dan pengembangan *e-government* di Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas *e-government* mudah diakses secara internal dan eksternal namun terdapat tantangan dimana perbandingan jumlah program perencanaan pembangunan dengan jumlah sumber daya manusia tidak seimbang, kondisi literasi TIK yang tidak semua memahami literasi TIK didominasi oleh aparatur lanjut usia namun dilakukan upaya peningkatan literasi TIK, penggunaan *e-government* di Kabupaten Purworejo dapat dirasakan secara internal dan eksternal serta memberikan harapan usaha yang minimal namun mencapai produktivitas maksimal.

3.1.3. Performance Expectancy (Harapan Kinerja)

Harapan kinerja merupakan dimensi ketiga dalam UTAUT. Harapan kinerja diartikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dan penerapan *e-government* yang akan menciptakan suatu kondisi kinerja pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien dan transparan. Harapan kinerja diukur berdasarkan kebermanfaatan penerapan *e-government* bagi masyarakat. Harapan kinerja memiliki beberapa variabel yaitu ketersediaan, efisiensi, keamanan informasi, kualitas informasi, fungsionalitas layanan, dan transparansi

Ketersediaan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketersediaan baik *e-government* baik secara sistem, informasi dan layanan. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terkait dengan ketersediaan *e-government* dapat diketahui bahwa sistem, informasi dan layanan *e-government* telah mencapai tingkat desa/kelurahan berupa aplikasi umum ataupun aplikasi khusus meskipun masih terdapat kendala berupa jumlah desa/kelurahan yang mencapai 469 serta akibat kondisi geografi yang menantang sehingga kesulitan untuk menjangkau akses internet yang menyebabkan terkendalanya aksesibilitas *e-government*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa kondisi ketersediaan secara umum masing-masing perangkat daerah memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum yang berasal dari pusat serta aplikasi khusus yang berasal dari Provinsi atau Kabupaten selain itu Pemda Kabupaten Purworejo memberikan keterbukaan kepada perangkat daerah untuk berinovasi terkait dengan *e-government* namun harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah diatur dengan Diskominfoasandi.

Berdasarkan penelitian terkait dengan ketersediaan *e-government* di Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan bahwa ketersediaan *e-government* telah mencapai tingkat desa/kelurahan meskipun terdapat kendala kuantitas desa/kelurahan yang banyak serta geografis desa/kelurahan. ketersediaan berupa aplikasi umum dan khusus serta Pemda Purworejo memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Perangkat Daerah melakukan inovasi dalam sektor *e-government* namun tetap berdasarkan peraturan dan kebijakan yang telah diatur oleh Diskominfoasandi.

Efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan menggunakan *e-government* dengan meminimalkan penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi mencakup kesederhanaan proses dan ketepatan waktu serta efisiensi proses itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terkait dengan efisiensi *e-government* bahwa dalam membangun sistem yang efisien tetap memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang bisa diperkirakan tidak efisien, hal tersebut menjadi modal yang harus dibayarkan dalam mengubah dan menciptakan suatu sistem baru. Selain itu dalam pembangunan internal terdapat suatu sistem surat antar perangkat daerah yang memang dibangun dengan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar namun hasilnya memberikan efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Pengumpulan data dilakukan juga dengan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa semakin pekerjaan yang dilakukan dengan digital dapat

menciptakan efisiensi yang semakin tinggi. Namun untuk mencapai hal tersebut memerlukan proses yang tidak efisien dalam pembangunan sistem digital.

Keamanan informasi didefinisikan kemampuan melindungi informasi dan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terkait dengan keamanan informasi bahwa pernah terjadi kebobolan situs dengan sub-domain purworejokab.go.id menjadi situs judi namun hanya sebatas sub-domain dan hal tersebut menjadi pembelajaran dengan menggunakan pertahanan digital.

Pertahanan digital yang diterapkan di Pemda Purworejo masih bersifat manual yang harus dilakukan oleh teknisi karena tidak menggunakan program berlangganan berbayar selain itu dalam penyimpanan digital dilakukan sistem blok sebagai pemisah informasi untuk mencegah terjadinya kebobolan data dan sistem. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diketahui bahwa Diskominfo dan Kabupaten Purworejo telah memperoleh ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan sedang direncanakan untuk standarisasi ke seluruh perangkat daerah.

Kualitas informasi didefinisikan sebagai nilai informasi dan data yang ada dan diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan terkait dengan kualitas informasi bahwa dalam Kabupaten Purworejo memiliki tim saber hoaks, tim PPID, tim satu data purworejo dan Admin medsos setiap perangkat daerah. Aparatur tersebut bertugas untuk mengelola kondisi kualitas informasi dan data yang ada di kabupaten Purworejo. Selain itu Aparatur tersebut dilakukan monev rutin terkait penerapan dan perkembangan yang terjadi.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara beberapa informan dan didapatkan bahwa informasi dan data yang ada di Kabupaten Purworejo dikelola oleh Tim tersendiri berdasarkan format yang telah ditetapkan selain itu dilakukan monitoring evaluasi sebagai proses untuk menjaga kualitas informasi.

Fungsionalitas layanan didefinisikan sebagai merupakan acuan kepada tingkatan penggunaan layanan yang diberikan oleh pemerintah. Fungsionalitas layanan memiliki cakupan berupa kegunaan dan keandalan layanan serta kesesuaian dengan tujuan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan fungsionalitas layanan e-government dapat diketahui bahwa fungsionalitas layanan dengan adanya dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum dan khusus yang masing-masing memiliki tujuan tersendiri dengan ruang lingkup tersendiri.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dan diketahui bahwa fungsionalitas layanan *e-government* telah mencakup seluruh perangkat daerah berdasarkan fungsi dan tujuannya masing-masing dengan dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Transparansi didefinisikan sebagai Merupakan acuan pada kualitas keterbukaan informasi dan data yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah. Transparansi mengacu kepada transparansi informasi dan proses serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa kabupaten Purworejo melalui perangkat daerah telah melakukan transparansi informasi dengan mempublikasikan secara digital melalui website. Transparansi informasi dilakukan oleh tim aparatur khusus yang menangani dikarenakan dalam publikasi informasi dan data terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti jenis data dan informasi apa saja yang dikecualikan berdasarkan peraturan atau kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan dapat diketahui bahwa transparansi informasi dan data memiliki tim yang bertanggung jawab terkait hal tersebut dikarenakan dalam publikasi data dan informasi dalam tujuan transparansi terdapat peraturan dan kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Harapan kinerja penerapan dan pengembangan *e-government* di Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan bahwa ketersediaan telah mencapai tingkat desa/kelurahan meskipun terkendala faktor

geografis, terdapat dua jenis aplikasi yaitu aplikasi khusus dan umum namun Pemkab Purworejo tidak membatasi inovasi namun tetap mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku, penerapan *e-government* menciptakan efisiensi namun dalam pembangunannya terjadi kondisi yang tidak efisien, keamanan informasi di Diskominfo sudah telah standar ISO 27001 namun pertahanan masih menggunakan pertahanan digital manual akibat tidak menggunakan program berbayar, terdapat tim tersendiri yang bertanggung jawab akan kualitas informasi dan transparansi informasi serta dengan adanya penerapan *e-government* dapat meningkatkan produktivitas secara optimal.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan jika dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi diketahui bahwa penelitian oleh Alvedi, Hepu Deng dan Vinh Thai tahun 2018 memberikan hasil berupa faktor penting dan saran dalam penerapan adopsi *e-government* kepada Pemerintah Indonesia sedangkan dalam penelitian yang dilakukan diketahui suatu kesimpulan berupa kerangka konseptual terkait penerapan dan pengembangan *e-government* sebagai bentuk saran dan pertimbangan untuk penerapan dan pengembangan *e-government* (Sabani et al., 2018). Kemudian terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa *e-government* berpengaruh dalam pengembangan *smart city* di Kabupaten Sumenep (Alfiyah, 2019). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan dimana penerapan *e-government* sebagai upaya menciptakan *smart city* di Kabupaten Purworejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Kahfi Ahadian Mutaqin dan Edi Sutoyo yang menghasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi *e-punten* dengan metode UTAUT sedangkan peneliti melakukan terkait penerapan *e-government* secara umum dengan metode UTAUT (Mutaqin & Sutoyo, 2020). Penelitian Anisa Safia Maznorbalia mempelajari tentang faktor kunci warga Malaysia dalam penerimaan dan penggunaan layanan *e-government* dengan metode UTAUT. Penelitian tersebut berbeda dimana peneliti menggunakan faktor kunci aparatur dalam penerapan dan pengembangan layanan *e-government* dengan metode UTATU (Safiah Maznorbalia & Aiman Awalluddin, 2021). Serta penelitian Mosleh Zebaree dan kawan-kawan yang menghasilkan identifikasi keberlanjutan adopsi penerapan *e-government* di Irak namun penelitian tersebut dihasilkan melalui pendekatan kuantitatif dan tidak menghubungkan dengan penerapan *smart City* (Zebaree et al., 2022).

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan kerangka konseptual *e-government* di Kabupaten Purworejo menggunakan metode UTAUT menemukan suatu temuan menarik berupa adanya proses yang tidak efisien untuk penerapan dan pengembangan *e-government* serta adanya sarana dan prasarana digital berupa penggunaan program berbayar yang masih belum diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

IV. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan didapatkan kerangka konseptual dalam penerapan dan pengembangan *e-government* yaitu untuk mencapai kondisi pelayanan publik yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yang cepat, mudah, transparan serta tidak berbelit-belit, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mencapai kondisi aksesibilitas *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup internal ataupun eksternal melalui pemanfaatan teknologi digital dengan sumber daya manusia yang terbatas namun produktivitas optimal dengan efisiensi waktu, tenaga dan biaya di perlukan kondisi adanya dorongan dari pemerintah baik secara anggaran, kebijakan, infrastruktur, kegiatan dan inovasi yang tidak hanya dilakukan di tingkat Pemda Kabupaten namun hingga tingkat pemerintah desa dan kelurahan. Anggaran diperlukan

dalam peningkatan infrastruktur baik fisik ataupun digital seperti peningkatan kapasitas server dan sistem digital serta penyelenggaraan sosialisasi dan monitoring evaluasi sebagai upaya peningkatan fungsionalitas layanan dan peningkatan literasi TIK aparatur sehingga dapat memanfaatkan sistem e-government secara optimal dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas kerja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian memiliki keterbatasan berupa lingkup yang digunakan terfokus kepada *leading sector* Diskominfostasandi serta tidak menganalisa terkait proses penerapan dan pengembangan *e-government* secara mendetail dan menyeluruh di Kabupaten Purworejo disebabkan terbatasnya waktu penelitian yang dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian namun diharapkan terdapat pembahasan atau penelitian lebih detail terkait pengembangan dan penerapan *e-government* di Pemerintah Kabupaten Purworejo secara menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Purworejo serta Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo terkhusus informan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdusasamad, D. H. Zu. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In D. P. Rapanna (Ed.), *Syakir Media Press*.
- Alfiyah, N. I. (2019). Pengaruh Penerapan e-Government Pada Pembangunan Smart City di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4800>
- Hardani, & Andriani, H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu Group* (1 ed., Vol. 1, Nomor 1). Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- LA. Hatani. (2008). Metode Kuantitatif Dalam Bisnis. In *Bahan Kuliah dan Praktikum* (1 ed.). <https://123dok.com/document/eqo04ojq-bahan-ajar-metode-kuantitatif-dalam-bisnis.html>
- Mutaqin, K. A., & Sutoyo, E. (2020). Analysis of Citizens Acceptance for e-Government Services in Bandung, Indonesia: The Use of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model. *Bulletin of Computer Science and Electrical Engineering*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.25008/bcsee.v1i1.3>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2018). A conceptual framework for the adoption of e-government in Indonesia. *ACIS 2018 - 29th Australasian Conference on Information Systems, November*. <https://doi.org/10.5130/acis2018.bi>
- Safiah Maznorbalia, A., & Aiman Awalluddin, M. (2021). Users Acceptance of E-Government System in Sintok, Malaysia: Applying the UTAUT Model. *Policy & Governance Review*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i1.348>
- Yusuf, P. D. A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. In *Kencana* (1 ed.). Kencana.
- Zeebaree, M., Agoyi, M., & Aqel, M. (2022). Sustainable Adoption of E-Government from the UTAUT Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095370>